



Buletin Parlementaria

Nomor 1041/III/II/2019 • Februari 2019

DPR Sahkan RUU Kebidanan



9 772614 339005

Ketua DPR Ajak Jerman Perkuat Investasi di Indonesia

DPR Sahkan RUU Kebidanan

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan menjadi Undang-Undang (UU). Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan yang dinamis di Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI, serta menyelaraskan rumusan RUU di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), dan lebih lanjut disetujui dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama dengan pemerintah. RUU Kebidanan ini terdiri dari 12 Bab dan 80 Pasal.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh Fraksi, apakah RUU tentang Kebidanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2). Serentak dijawab “Setuju” oleh Anggota Dewan, dan disambut ketukan palu dari Pimpinan Sidang yang menjadi tanda pengesahan RUU menjadi UU.

Sebelumnya, dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena sebagai Ketua Panja RUU Kebidanan melaporkan bahwa Rapat Kerja Komisi IX DPR RI beserta pemerintah pada 4 Februari lalu telah menyetujui RUU Kebidanan disahkan dalam

Rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut seluruh perwakilan Fraksi di Komisi IX DPR RI dapat memberikan persetujuan terhadap RUU Kebidanan untuk dilanjutkan kepada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Ermalena melanjutkan, dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU Kebidanan, pihaknya telah menugaskan Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk melakukan penelitian dan penyusunan awal. “Terhadap penugasan tersebut, BK DPR RI telah melaporkan hasil kerjanya kepada Komisi IX DPR RI pada 10 Maret 2016, yaitu berupa penyampaian naskah akademik dan draf RUU tentang kebidanan yang terdiri dari 12 bab dan 91 pasal,” jelas Ermalena.

Legislator PPP itu juga melaporkan,

demi memperkaya wawasan untuk penyempurnaan konsepsi RUU Kebidanan, Komisi IX DPR RI telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Komisi IX DPR RI mengadakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan baik dengan institusi pemerintah, akademisi, dan pakar.

Selain itu, masih kata Ermalena, pelibatan organisasi profesi di bidang tenaga kesehatan dan tenaga medis dipandang sangat penting, termasuk Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Masukan para pemangku kepentingan telah diakomodasi di dalam RUU Kebidanan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengapresiasi disahkannya RUU Kebidanan menjadi UU. Ia berharap UU ini bisa meningkatkan mutu kebidanan, memberikan perlindungan hukum, dan menciptakan pemerataan keberadaan bidan.

“Semoga UU yang mengatur penyelenggaraan praktik kebidanan secara komprehensif ini bisa memberikan perlindungan hukum pada bidan maupun masyarakat, sehingga bisa memberikan perlindungan sesuai UUD 1945,” harap Nila. ■ **eko/sf**



Sejumlah perwakilan bidan mengucapkan terima kasih kepada DPR RI atas pengesahan UU Kebidanan.



Foto: Jaka IHR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Duta Besar Jerman untuk Indonesia, H.E. Mr. Peter Schoof.

Ketua DPR Ajak Jerman Perkuat Investasi di Indonesia

Ketua DPR RI mengajak Jerman sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di Eropa untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia.

Khususnya, pada sektor manufaktur. Pada tahun 2017, nilai investasi Jerman di Indonesia untuk sektor manufaktur mencapai 79,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) dengan total 108 proyek. Proyek investasi Jerman tersebut didominasi oleh sektor industri baja dan mesin, kimia dan farmasi serta otomotif.

“Presiden Joko Widodo dua kali berkunjung ke Jerman, tahun 2016 dan 2017. DPR RI senantiasa mendukung berbagai kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral, terutama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menerima Duta Besar Jerman untuk Indonesia, H.E. Mr. Peter Schoof, di ruang kerja Ketua DP RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala Bidang Politik Kedutaan Jerman Mr. Martin Eberts, Wakil Kepala Bidang Politik Kedutaan Jerman Jans Hoch. Sedangkan Ketua DPR RI ditemani Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus

Hermanto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung.

Politisi Partai Golkar ini menilai, peningkatan investasi Jerman di Indonesia sangat penting guna mengimbangi defisit perdagangan dalam hubungan dagang Indonesia - Jerman. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat, tahun 2016 defisit sebesar USD 520,8 juta, tahun 2017 defisit 869,8 juta dolar AS dan tahun 2018 defisit lebih dari 1 miliar dolar AS. Di tahun 2019 ini, DPR RI berharap defisit tersebut bisa diperkecil.

“Jerman harus bisa memberikan kemudahan atas masuknya berbagai barang ekspor unggulan Indonesia. Seperti minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, pakaian dan asesoris pakaian, karet dan produk dari karet, mesin-mesin mekanik, kopi, teh dan rempah-rempah, alat fotografi, kayu dan mebel. Kerja sama berkeadilan harus menjadi semangat dalam membangun hubungan dagang Indonesia - Jerman,” papar Bamsuet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini juga menyambut positif kerja sama antara German Research Center for

Geosciences dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam bidang pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dan Pengembangan energi panas bumi. Pada bulan Januari 2019, pihak Jerman telah melakukan serah terima asset Pilot Plant PLTP Binary Cycle 500 Kilo Watt kepada Pemerintah Indonesia di Tomohon, Sulawesi Utara.

“Sebagai wilayah yang berada di ‘ring of fire’, menjadikan Indonesia memiliki potensi geotermal yang sangat besar sekali, mencapai 29.215 GWe. Pemanfaatannya bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan fosil, serta membantu pencapaian target emisi dan kelestarian lingkungan. Kita mengundang Jerman untuk lebih ambil bagian lagi terhadap pemanfaatan geotermal tersebut dengan mengedepankan prinsi keadilan dan saling menguntungkan,” urai Bamsuet.

Bamsuet menyadari tidak selamanya negara-negara di dunia bergantung kepada bahan bakar dari fosil yang jumlahnya semakin menipis. Karena itu, Indonesia kini mulai fokus mengembangkan mobil dan motor listrik. Rencananya Maret 2019 nanti PT. Gesits Technologies Indo (GTI) dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya akan meluncurkan motor listrik generasi pertama karya anak bangsa, yang diberi nama Gesit.

“Untuk pembuatan mobil listrik, Indonesia masih perlu banyak tahapan yang harus dilalui. Sebagai negara yang juga fokus pada *renewable energy*, Jerman bisa berkolaborasi dengan Indonesia dalam pembuatan mobil listrik. Kita bisa saling alih teknologi dan melengkapi satu sama lain. Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar, kita juga ingin menciptakan peluang,” jelas Bamsuet.

Tak lupa, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menyampaikan harapannya agar Jerman dan Indonesia terus bekerja sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, khususnya melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Sebagaimana diketahui, mulai Januari 2019 hingga akhir 2020, Indonesia dan Jerman mendapatkan kepercayaan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

“Ini adalah keempat kalinya Indonesia menjadi Anggota Tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pertama kali dimulai pada tahun 1973-1974, lalu 1995-1996, dan 2007-2008. Kali ini sebagai sesama Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia - Jerman akan saling bahu membahu mewujudkan dunia yang lebih baik lagi,” pungkas Bamsuet. ■ **hs/sf**

Tim Pemantau Otsus Segera Kunjungi Tiga Wilayah

Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI segera akan berkunjung ke tiga wilayah khusus, yaitu Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melihat pelaksanaan regulasi Otsus. Ketiga wilayah ini punya kekhususan sendiri dengan anggaran yang juga khusus.



Ketua Tim Pemantau Otsus Fadli Zon memimpin rapat internal Otsus.

Ketua Tim Pemantau Otsus Fadli Zon menjelaskan, ada usulan agar Tim Pemantau mengunjungi tiga wilayah khusus itu untuk melihat dari dekat implementasi peraturan khusus. “Agendanya seperti di Sabang ada pelaksanaan pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Di Papua saya kira kita perlu melihat persiapan menghadapi Pemilu,” kata Fadli, usai memimpin rapat internal Otsus, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/2).

Sementara di Yogyakarta, tim akan memantau implementasi Perda khusus yang berlaku di wilayah Provinsi Yogyakarta. Anggaran di ketiga wilayah tersebut, sambung Wakil Ketua DPR RI ini, juga menggunakan anggaran khusus. Tim Pemantau DPR RI akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus mengaudit penggunaan dana Otsus tersebut.

“Tim ini sangat penting untuk memantau peraturan Otsus, baik peraturan-peraturan dan implementasi dari undang-undang yang ada. Ini, kan, berbeda dari daerah-daerah lain yang mempunyai undang-undang khusus dengan dana yang juga khusus. Ada dana Otsus Aceh, ada dana Otsus Papua, dan ada dana Otsus Yogyakarta,” tutur legislator Partai Gerindra itu.

Yang menarik, ada usulan yang berkembang dalam rapat internal itu. Pada periode yang akan datang, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta akan masuk Tim Pemantau DPR RI. DKI Jakarta juga punya kekhususan sebagai ibu kota negara. “Kita harapkan pada periode yang akan datang, kita akan ikut memantau DKI,” ungkap Fadli. ■ mh/sf

Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI segera akan berkunjung ke tiga wilayah khusus, yaitu Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melihat pelaksanaan regulasi Otsus. Ketiga wilayah ini punya kekhususan sendiri dengan anggaran yang juga khusus.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memastikan, DPR RI berupaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral, khususnya sektor pertumbuhan ekonomi dan kerja sama di bidang teknologi dengan Parlemen Jerman. Apalagi, dalam waktu dekat, Parlemen Jerman pun akan melakukan kunjungan ke DPR guna meningkatkan kerja sama tersebut.

Hal itu dipertegas Agus usai mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Dubes Jerman untuk Indonesia Peter Schoof, guna membahas rencana kunjungan Parlemen Jerman ke DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2).

“Hal yang dibahas yakni kunjungan parlemen Jerman ke Indonesia yang akan dilakukan sebentar lagi. Selain itu Dubes juga menyampaikan hal penting. Dubes mengatakan (kedua negara) harus memperkuat masalah ekonomi, dalam hal ini neraca perdagangan harus diperkuat,” ungkap Agus.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendampingi Ketua DPR RI menerima Dubes Jerman.

DPR Komitmen Tingkatkan Kerja Sama Indonesia - Jerman

Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan sejumlah topik yang dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya yakni peningkatan kerja sama di bidang energi baru dan terbarukan (renewable energy) yang kini sudah terjalin baik. Seperti contoh teknologi yang diterapkan di Sulawesi Utara yang berasal dari Jerman.

“Kita berdiskusi tentang *renewable energy* dan Dubes sangat konsen soal itu. Dan dia juga selalu ingin tetap bekerja sama dengan Indonesia di bidang energi. Teknologi yang pertama kali diterapkan di Sulawesi Utara itu teknologi dari Jerman yang menggunakan efisiensi dari air panas untuk menghidupkan turbin,” jelas legislator dapil Jawa Tengah itu.

Sehingga antara Indonesia dengan Jerman sama-sama punya niat untuk meningkatkan

kerja sama, sehingga ini adalah hal positif. “Selain untuk memperlancar kunjungan parlemen Jerman ke Indonesia, kunjungan ini juga untuk menguatkan kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, keteknikan dan tentunya tidak kalah penting adalah mahasiswa Indonesia yang belajar di Jerman, dan itu mendapatkan perhatian dari Dubes,” tutur Agus.

Harapannya, momentum pertemuan Parlemen Jerman dengan Indonesia adalah hal yang baik dalam rangka memperkuat kerja sama antar kedua negara di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Turut serta dalam pertemuan ini Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. ■ **hs/sf**



in untuk Indonesia Peter Schoof.



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah, Geraldio Opie

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Didang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Foto: Jaka | Hlr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono ke Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.

DPR Akan Revisi Regulasi Wilayah Akuatik dan Terrestrial

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengungkapkan, selama ini aturan mengenai wilayah terestrial dan akuatik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengalami tumpang tindih dalam hal kewenangannya.

Selama ini wilayah terestrial dan akuatik masih merupakan ranah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), padahal sejak pemekaran seharusnya sudah menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk itu, Komisi IV DPR RI segera merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990.

Hal ini ia sampaikan ketika memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini. Legislator Partai Golkar itu menegaskan, Komisi IV DPR RI akan segera melakukan revisi terhadap UU tersebut, agar tidak bertabrakan dalam pengaplikasiannya.

“Memang harus dipertegas, diadakan suatu pemisahan tersendiri dalam rangka pengelolaan tata kelola kelautan, termasuk ketegasan masalah akuatik. Dan saya kira ini menjadi suatu masukan yang berharga buat kami untuk untuk dibahas di DPR, masalah akuatik dan terestrial dalam bahasan revisi Undang-undang Nomor 5 tahun 1990,” ujar Roem Kono.

Politisi dapil Gorontalo tersebut menjelaskan bahwa sebelum adanya terjadi pemekaran KKP, tupoksi pengawasan konservasi kelautan berada dalam wewenang KLHK. Tetapi setelah KKP berdiri sendiri, maka kewenangan itu sudah seharusnya berpindah sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi meminta DPR RI agar melakukan perpanjangan komunikasi ke seluruh kepala daerah untuk dapat membantu konsolidasi dan sosialisasi



Foto: Jaka | Hlr

Komisi IV Apresiasi Kinerja Produksi Pusri Palembang

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengapresiasi dan menyatakan rasa puasnya atas kinerja yang telah dilakukan oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang, karena produksi pupuk tahun lalu sudah mencapai target. Untuk tahun 2019 ini pun diharapkan tetap maksimal, sehingga ketersediaan pupuk untuk supply tetap aman.



Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah.

ini,” ungkapnya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama PT. Pusri Palembang beserta jajaran, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (06/2).

Sehubungan dengan adanya wacana pengurangan pupuk bersubsidi, politisi Partai Nasdem itu mengatakan, sejauh ini hal tersebut masih sebatas wacana dan masih perlu pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam lagi. Ia memastikan, Komisi IV DPR RI akan tetap berpihak pada rakyat, namun tetap mendukung program yang dijalankan Pusri. Dengan demikian antara Parlemen dan produsen pupuk akan selalu bersinergi dalam melayani masyarakat dengan baik.

Ia berharap stabilitas Pusri bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga tidak ada istilah penurunan. “Produksinya diharapkan bisa bertambah. Dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat akan lebih prima lagi. Target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, bukan hanya di satu komoditas, tetapi di semua komoditas untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan mungkin dilakukan ekspor ke negara-negara yang membutuhkan,” harap Sulaeman.

Di sisi lain, legislator dapil Papua itu mengingatkan perlu ada penghitungan yang lebih matang terkait rencana pencetakan sawah baru. Harus ada kalkulasi yang lebih baik agar kelak pendistribusian pupuknya bisa dilakukan secara merata dalam melayani kebutuhan pupuk bagi sawah baru tersebut. Menurutnya, jika masih ada kekurangan pupuk, diharapkan bisa segera diatasi, karena selisihnya tidak terlalu besar. ■ **dep/sf**

mengenai program konservasi daerah pesisir. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk mengambil alih taman laut.

“Jadi kami minta tolong kepada Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan kepada Gubernur dan Bupati serta Wali Kota, agar sama-sama mengelola laut, sama-sama melakukan konservasi. Dan sama-sama sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kebersihan laut, tidak membuang sampah plastik, dan menjaga ekosistem. Sehingga laut ini bisa dimanfaatkan sampai anak cucu kita,” pungkas Brahmanthya.

Dalam rangkaian kunspek tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan pelestarian dan perlindungan terhadap jenis biota laut yang dilindungi dan terancam punah di wilayah Sulawesi yang diwakili pemerintah, yaitu KKP bersama para stakeholder termasuk para pengusaha perikanan dengan Komisi IV DPR RI sebagai saksinya. ■ **ran/sf**

Ia menilai, kesiapan Pusri sudah matang. Hal itu dibuktikan dengan adanya dukungan dari tenaga kerja dan manajemen yang baik. “Hal ini tentunya sangat mendukung bagi pertanian kita di tahun ini. Saya yakin Pusri siap untuk melayani petani, dan petani juga bisa bergairah untuk lebih produktif lagi. Dengan ketersediaan pupuk yang ada, maka hasil yang diharapkan bisa lebih meningkat lagi pada tahun 2019

Harus ada kalkulasi yang lebih baik agar kelak pendistribusian pupuknya bisa dilakukan secara merata dalam melayani kebutuhan pupuk bagi sawah baru



Foto: Eka Hindra / IHR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo memimpin Tim Kunspek meninjau Bendungan Beriwit di Berau, Kaltim.

Komisi V Tinjau Bendungan Beriwit

Bendungan Beriwit di Desa Sukan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dibangun pada tahun tahun 2013 dengan menelan anggaran hingga Rp 140 miliar. Namun Komisi V DPR RI mendapat informasi, sampai saat ini bendungan ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.

Minimnya anggaran yang diberikan setiap tahunnya menjadi salah satu penyebab bendungan ini belum bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Hal ini pun menjadi perhatian Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Padahal sebelumnya di sekitar lokasi bendungan pernah ada lahan sawah seluas 300 hektar, namun akibat bandungan yang belum bermanfaat membuat sebagian masyarakat yang notabene transmigrasi memilih kembali ke Pulau Jawa,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Beriwit di Berau, Kaltim, Kamis (07/2). Turut hadir Wakil Bupati Berau, Dirjen Irigasi dan Rawa, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III.

Di samping itu, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus

melakukan evaluasi seluruh bendungan yang ada di Indonesia, termasuk Bendungan Beriwit di Berau ini. Evaluasi ini harus ditujukan terhadap manajemen bendungan di Indonesia. Diantaranya dalam hal alokasi anggaran harus diprioritaskan terhadap bendungan yang belum selesai.

“Tolong prioritaskan dulu jangan membuat bendungan atau rencana baru, selesaikan saja yang sudah ada supaya bisa dirasakan masyarakat. Setelah itu baru bangun saluran primer, sekunder dan tersier sehingga mencetak lahan sawah,” tandas legislator dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Wilayah Sungai (KBWS) Kalimantan III Kaltim-



Kaltara Anang Muchlis mengatakan, Kementerian PUPR sudah melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan masyarakat, yaitu menyiapkan kebutuhan air baku untuk keperluan pertanian ditambah irigasi sampai tersier yang akan diselesaikan, hingga tahun 20202 yang akan datang.

“Pokok persoalan yang ada bukan soal pembangunan bendungan, karena sudah selesai dibangun. Melainkan belum dimanfaatkan atau dirasakan manfaatnya bendungan ini oleh masyarakat sekitar. Lahan sawah ini bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR, tetapi dalam hal ini Kementerian Pertanian dan saat ini daerah sudah berkomitmen menyiapkan 300 hektar. Kewenangan di bawah 300 hektar itu sebenarnya kewenangan provinsi, sementara Kementerian PUPR menangani di atas 300 hektar,” ucapnya.

■ hr/sf

Pembebasan Lahan Jadi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan flyover ruas Jalan Jenderal Sudirman di Kota Ambon hingga kini masih menemui kendala dalam pembangunannya. Salah satu penyebabnya adalah belum selesainya proses pembebasan lahan.



Foto: Sofyan IHR

Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua.

Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua menilai, sulitnya pembebasan lahan merupakan permasalahan klasik yang kerap terjadi dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, perlu pelibatan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan hal ini.

“Kalau berbicara soal pembebasan lahan, itu sebenarnya perlu melibatkan pemerintah daerah karena yang punya wilayah itu pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah harus turun tangan menyelesaikan dan memberikan ruang kepada

Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk melaksanakan kegiatannya, apakah itu infrastruktur jalan, jembatan, dan lain sebagainya,” kata Abubakar saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (06/2).

Legislator PPP itu menambahkan, terkait pembebasan lahan ini perlu ada penanganan serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah. Kalau proses ini sudah sinkron, maka tidak ada lagi beban yang lain, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar. “Karena masalah tanah ini adalah masalah-masalah yang sangat mengganggu berbagai aktifitas pembangunan jalan, jembatan dan berbagai infrastruktur lainnya,” tandas legislator dapil Sulawesi Selatan III ini.

Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Maluku dan Maluku Utara Satrio Sugeng Prayitno memaparkan, pembangunan flyover ruas Jalan Jenderal Sudirman Ambon terkendala pembebasan lahan. Total luas pembebasan lahan mencapai 5,295,41 meter persegi, dengan total perkiraan biaya Rp 55 miliar. Dalam pembangunan flyover yang memakan anggaran sebesar Rp 145 miliar ini, pihaknya sudah melalui beberapa tahapan.

Tahun 2015, jelas Sugeng, pihaknya telah melakukan *feasibility study* (FS) flyover ruas Jalan Jenderal Sudirman Ambon. Kemudian pada tahun 2016, telah dilakukan Detail Engineering Design (DED) yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 dilakukan penyusunan Dokumen analisa dampak lalu lintas flyover ruas Jalan Jenderal Sudirman. ■ sf

Butuh Perda Bangunan Gedung Untuk Alokasikan Anggaran Infrastruktur Daerah



Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing.

Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing mengharapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar segera menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung.

Perda tersebut bisa menjadi landasan hukum untuk pengalokasian anggaran dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan infrastruktur di Pematangsiantar.

“Kita minta Pemda Siatar itu agar proaktif menyiapkan Perda. Karena jika belum ada perda bisa menjadi penghalang anggaran dari pusat masuk ke Pematangsiantar. Dengan pembangunan infrastruktur kota akan terlihat bersih dan indah,” papar Anthon saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, baru-baru ini.

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah diingatkan untuk menyiapkan program pembangunan agar dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005, mengamanatkan bahwa seluruh bangunan di kabupaten/kota di Indonesia harus ada Perda Bangunan Gedung.

“Proyek-proyek cipta karya, antara lain ruang terbuka hijau, mengindahkan kota itu banyak di cipta karya. Makanya kita minta Pemda Siatar agar mempercepat Perda. Perda tentang izin atau tata cara membangun, nah itu belum selesai. Kalau itu selesai proyek-proyek Cipta Karya bisa di-bikin di Pematangsiantar ini,” jelas Anthon.

Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Sumut Ikhwanul Ihsan mengatakan, pengalokasian dana pembangunan gedung untuk Kota Pematangsiantar sangat strategis dan semua program di instansinya sangat memungkinkan dimasukkan ke Kota Pematangsiantar. ■ **eko/sf**

PT. Indonesia Asahan Aluminium, atau lebih dikenal sebagai PT. Inalum merupakan BUMN pertama dan terbesar Indonesia yang bergerak dibidang peleburan aluminium.

Namun perusahaan ini kini menghadapi permasalahan sulitnya membayar Pajak Permukaan Air (PAP). Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membebaskan PAP kepada PT. Inalum yang nilainya yang mencapai Rp 500 miliar per tahun.

“Bagaimana kalau penghasilannya dalam satu tahun Rp 500 miliar? Tentu habis (untuk membayar). Sedangkan waktu sama Jepang dahulu hanya Rp 80 miliar. Kenapa sama BUMN bisa kena Rp 500 miliar? Itu berarti ada persoalan tentang otonomi daerah,” tanya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah

Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan meminta pemerintah segera mengambil keputusan segera untuk membayar utang subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Kujang. Supaya produksi pupuk terus bergulir dan petani bisa mendapatkan pupuk dan terus menanam lahan yang digarapnya.

“ Dalam konteks ini, Presiden selalu mengatakan ingin swasembada pangan dan produksi pangan besar. Harus ada prioritas pembiayaan, persoalan pangan adalah kebutuhan primer, artinya pemerintah tidak boleh ada telat bayar terhadap subsidi pupuk,”pungkas Zulfan, usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT. Pupuk Indonesia dan PT. Pupuk Kujang di Cikampek, Jawa Barat, Rabu (06/2).

Menurut politisi Partai NasDem ini, karena telat bayar subsidi itu, produksi pupuk menjadi terhambat. Bahkan pabrik tidak bisa memproduksi karena dananya masih tertahan. “Kalau kita tidak membuat klasifikasi prioritas pengelolaan pangan itu susah. Akhirnya kita ambil *simple* saja dengan mengurangi subsidi, padahal permasalahannya karena telat bayar,” imbuhnya.

Selain itu, terkait kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi pupuk, Zulfan meminta pemerintah memberi kejelasan.



Foto: Jaka IHR

Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan.

Menurutnya, yang namanya subsidi itu harus dipertahankan, jika perlu malah ditingkatkan.

“Petani kita kan kebanyakan bukan orang-orang yang punya investasi besar.

Pemerintah Diminta Segera Bayar Utang Subsidi Pupuk PT. Pupuk Kujang

Subsidi harus dipertahankan kalau kita ingin swasembada pangan, sehingga kita tidak mengimpor beras, gula dan lain-lain. Menurut saya pemerintah harus cari jalan keluar dimana ada anggaran dan pembiayaan untuk tetap mempertahankan atau memperbesar,” tuturnya.

Legislator Dapil Aceh II ini menambahkan, posisi pupuk itu sangat strategis terutama bila dikaitkan dengan daya tahan pangan. Kalau pupuk ini tidak mendapatkan *support* dari pemerintah, dikhawatirkan hal ini akan mengganggu ketahanan pangan.

“Jika ini tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih serius dari pemerintah, maka akan mengganggu daya tahan pangan kita, karena pertanian ini sangat membutuhkan pupuk dalam produksinya,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Kujang Cikampek Nugraha Budi Eka Irianto mengatakan, saat ini pemerintah sudah membayar utang pupuk subsidi sebesar Rp 600 miliar, dari total Rp1,5 triliun. ■ **jk/sf**

Komisi VI Soroti Persoalan PAP Inalum



Foto: Arief IHR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir.

Zubir usai memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan direksi PT. Inalum, di Sumut, Kamis (07/2).

Untuk itu, kata Anggota Fraksi Partai Hanura itu, dalam kunspek ini pihaknya meminta data mengenai persoalan yang

PT. Inalum memiliki peran yang sangat penting pasca menyandang status sebagai induk holding BUMN pertambangan, dan akan memacu produksi almunium yang ditargetkan sampai tahun 2021.

dihadapi PT. Inalum ini, dan akan dibahas pada rapat dengan pemerintah, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN. Ia menegaskan, jangan sampai nasib perusahaan BUMN ini merugi.

“Juga akan kami diskusikan dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan tingginya pajak permukaan air. Ketinggian perhitungan airnya tidak lagi per-KWH, tapi tarifnya per meter kubik. Setahu saya hampir di atas Rp 1.000 per kubik itu berat untuk Inalum,” tandas legislator dapil Banten III ini.

Inas menambahkan, PT. Inalum memiliki peran yang sangat penting pasca menyandang status sebagai induk *holding* BUMN pertambangan, dan akan memacu produksi almunium yang ditargetkan sampai tahun 2021. “PT Inalum akan memproduksi sebanyak 500 ribu ton almunium dan baru terealisasi antara 250 sampai 260 ton dan kebutuhan dalam negeri 900 ribu ton per tahun,” ungkap Inas. ■ **af/sf**



Foto: Ryan | HR

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meninjau Puslit Kopi dan Kakao di Jember.

Puslit Kopi dan Kakao Jember Ciptakan Bibit Bebas Hama

Komisi VII DPR RI berharap dengan adanya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Kabupaten Jember bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang tahan terhadap hama dan cuaca ekstrim.

Puslit Kopi dan Kakao saat ini juga banyak menghasilkan tanaman bibit unggul yang disebar ke petani-petani lokal di seluruh Indonesia. Produk andalannya antara lain pohon kopi super yang memiliki akar yang besar dan tahan terhadap hama dan cuaca yang ekstrim.

“Adanya Puslit Kopi dan Kakao di Jember ini saya berharap juga berdampak ke daerah lain, seperti bibit-bibitnya dikirim ke Medan yang juga terkenal dengan tanaman kopinya. Puslit ini sangat bagus, karena selain meneliti dan memunculkan bibit unggul tanaman, juga menciptakan petani yang kompeten melalui kemitraannya,” tutur Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI berkunjung ke Puslit Kopi dan Kakao di Jember, Jawa Timur. Rabu (06/2).

Selain menghasilkan bibit tanaman kopi dan kakao unggulan, Puslit Kopi dan Kakao Jember juga menciptakan alat pengolahan kopi, dari mesin penggiling kopi hingga mesin *roasting* kopi yang sudah memiliki standar yang bagus. “Di Puslit Kopi dan Kakao Jember ini banyak sekali produk yang dapat kita lihat. Dari beragam cokelat dan

kopi yang memiliki kualitas yang sangat baik, ada juga produk olahan dari kopi dan cokelat,” tandas legislator Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menuturkan, dengan adanya Puslit Kopi dan Kakao Jember bisa menciptakan varietas jenis kopi dan kakao, sehingga petani dapat menanam benih-benih kopi dan kakao yang tahan terhadap hama. “Saya sebagai Anggota DPR RI dapil Jember sangat bersyukur dengan adanya Puslit ini, karena selain menyerap tenaga kerja juga bisa menciptakan benih tanaman yang berkualitas,” tutur politisi Partai Gerindra ini.

■ rh/sf

Komisi VII Perjuangkan Kenaikan Anggaran Geologi

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran geologi di tahun 2019 ini melalui APBN-Perubahan.

U paya ini diperoleh usai melakukan kunjungan kerja ke Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Daerah Istimewa Yogyakarta guna melihat mekanisme kerja kegeologian terhadap gunung berapi.

“Kami akan memperjuangkan peningkatan jumlah peralatan BPPTKG terutama untuk mengantisipasi erupsi gunung berapi. Pada tanggal 11 Februari 2019 kita akan melakukan rapat

Calon Penerima Beasiswa Bidikmisi Harus Tepat Sasaran

Tim Panja Kelembagaan dan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI memastikan bahwa calon penerima beasiswa bidikmisi harus tepat sasaran.

dan Perguruan Tinggi Swasta untuk diverifikasi.

“Nah keluh kesah dari UNTIDAR ini yang membuat kami sangat kecewa. Selama ini saya dan teman-teman (Anggota DPR RI) mendapat masukan bahwa usulan yang berasal dari Universitas yang bersangkutan justru yang tidak tepat sasaran, karena kenal dengan dosen, struktural, sehingga yang mendapatkan beasiswa adalah yang

Tim Panja ini mengawasi permasalahan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang berjalan di Universitas Negeri Tidar (UNTIDAR) dan Universitas Muhammadiyah Magelang.

“Calon penerima beasiswa bidikmisi haruslah tepat sasaran yakni bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik,” tegas Anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana kepada Parlemen di Kantor Bupati Magelang, Jawa Tengah, Rabu (6/2).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini membeberkan bahwa ada salah satu dari dosen UNTIDAR yang menyampaikan tentang program beasiswa bidikmisi yang disinyalir bermasalah karena mendapatkan daftar calon penerima beasiswa bidikmisi aspirasi tersebut dari Anggota Komisi X DPR RI.

“Perlu saya luruskan disini, Anggota DPR RI mempunyai hak mengusulkan karena ini ada payung hukumnya dalam UU MD3, yaitu memperjuangkan aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing. Jadi ini sah secara hukum dengan aturan yang berlaku,” tegas legislator dapil Jateng itu.



Foto Rizki | HR

Anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana tinjau PT. Berau Coal Energy di Kabupaten Berau.

Laila melanjutkan, Komisi X DPR RI menerima aspirasi calon mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki potensi akademik yang baik sehingga ini sudah tepat sasaran. Setelah mengantongi nama calon penerima beasiswa tersebut, Komisi X menyerahkan ke Perguruan Tinggi Negeri

terdekat dari mereka,” tandas Laila.

Dengan kejadian ini Komisi X merasa perlu menggali sumber ketidakberesan dan ketidaksinkronan calon peserta penerima beasiswa bidikmisi agar kedepan penerima manfaat ini betul-betul tepat sasaran. ■ cas/es



Foto Geraldi | HR

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman.

kerja dengan Menteri ESDM dan melalui forum itu nanti Komisi VII akan meminta peningkatan anggaran untuk BPPTKG,” ujar Gandung Pardiman, di Yogyakarta, Rabu (06/2).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini cukup terkejut, ternyata BPPTKG ini hanya ada satu di Indonesia, padahal jumlah gunung berapi di Indonesia cukup banyak. Sehingga ia mendorong agar fungsi ini diperkuat dalam mengantisipasi erupsi gunung api yang bisa secara tiba tiba meletus, penguatan anggaran adalah menjadi jalan utama.

“Kami juga terkejut bahwa BPPTKG ini hanya ada satu di Indonesia dan fokus kepada gunung berapi maka dari itu jika ada gunung yang batuk batuk ini harus prioritas. Diketahui APBN sekarang,

Kementerian ESDM itu anggarannya terpotong 700 miliar dalam APBN-P ini akan kita mintakan kembali,” ujarnya.

Penguatan lain yang menjadi *support* Komisi VII adalah penguatan rekomendasi BPPTKG terhadap peta rawan bencana khususnya berkaitan dengan aktivitas geologi. Diketahui, banyak rekomendasi BPPTKG yang tidak dijalankan dengan baik misalnya di Palu dan Krakatau.

Pada tahun 2009 sudah direkomendasikan bahwa kawasan itu tidak baik digunakan untuk pembangunan gedung tinggi karena berpotensi bencana. “Artinya rekomendasi dari BPPTKG ini tepat sasaran tetapi tidak dijalankan oleh pemerintah daerah, ini harus segera diperkuat,” tutup Gandung. ■ hs/es



Foto: Singgih I HR

Anggota Komisi IV DPR RI Susi Syahdona Marleny Bachsin Bersama Kelompok Tani Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Hutan rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemenuhan kebutuhan kayu terutama di tingkat masyarakat.

Hutan Rakyat Jadi Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Kayu

Mengingat saat ini semakin terbatasnya pemenuhan bahan baku kayu baik untuk industri perikanan maupun pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat dikarenakan produksi kayu yang semakin menurun.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Susi Syahdona Marleny Bachsin meninjau Kelompok Tani Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Provinsi Bengkulu, Rabu (6/2).

Lebih lanjut, Dona ungkapkan

bahwa masih rendahnya produktivitas kayu pada hutan rakyat disebabkan salah satunya oleh rendahnya kualitas bibit yang digunakan, sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kayu rakyat.

Hasil evaluasi pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada 14 juta hektar lahan kritis, maka ini perlu dilakukan percepatan dan melibatkan peran serta semua pihak. Salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui kelompok-kelompok tani yang ada melalui program KBR.

“Kebun Bibit Rakyat ini merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bibit yang lebih baik berbasis pemberdayaan masyarakat dengan salah satu sasaran penggunaannya adalah penanaman pada hutan rakyat,” ungkap politisi dapil fraksi Partai Gerindra itu.

Legislator dapil Bengkulu ini mengatakan bahwa program KBR ini dilaksanakan guna menyiapkan bibit berkualitas dalam jumlah yang cukup banyak, juga untuk mendukung program penanaman di areal lahan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang



berbasis rehabilitasi lahan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa, Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Dalam Peraturan Menteri LHK P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Kebun Bibit Rakyat, KBR adalah kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang dikelola oleh lembaga desa/kelompok adat/kelompok masyarakat/ kelompok tani hutan perhutanan sosial, beranggotakan baik laki-laki dan/atau perempuan yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah dan dipergunakan untuk penanaman sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. ■ **skr/es**

Anak Perlu Pendidikan Akhlak Mulia

Pendidikan akhlak mulia bagi anak merupakan tugas bersama dari orang tua, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari anak berada dalam ketiga lingkungan tersebut, sehingga pendidikan akhlak mulia di sekolah sama pentingnya dengan pendidikan karakter di rumah.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menanggapi video viral yang menampilkan seorang siswa menantang dan memperlakukan gurunya secara tidak layak. Kejadian yang diduga terjadi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur itu sempat mendapat perhatian publik. Banyak pihak menyayangkan kejadian yang tak etis itu.

“Sekolah merupakan tempat sosialisasi yang penting dalam kehidupan siswa. Karena di sekolah anak belajar tentang berbagai peraturan, nilai-nilai dan kultur

Pendidikan akhlak hendaknya disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak didik. Sehingga pendidikan akhlak mulia di sekolah dapat mengokohkan minat anak didik untuk berperilaku mulia.

yang ada di masyarakat, sekaligus menjalankan perannya kelak sebagai orang dewasa yang berakhlak mulia,” ungkap Sutan dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Senin (11/2).

Legislator Partai Gerindra ini menambahkan, pendidikan akhlak hendaknya disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak didik. Sehingga pendidikan akhlak mulia di sekolah dapat mengokohkan minat anak didik untuk berperilaku mulia.

Walaupun pendidikan akhlak mulia di sekolah tidak diajarkan pada pelajaran akademik seperti mata pelajaran tertentu, namun pendidikan akhlak mulia sama pentingnya dengan mata pelajaran yang lain. Karenanya, perlu digiatkan dan ditingkatkan pendidikan akhlak melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, maupun kegiatan baru yang diciptakan bersama oleh siswa dan guru.

“Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pendidikan akhlak mulia di sekolah, dengan harapan para siswa tidak hanya cerdas intelektualnya namun juga cerdas emosional dan spiritualnya,” tandas legislator daerah pemilihan Jambi ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beredar video aksi siswa main kuda-kudaan saat jam pelajaran berlangsung di salah satu kelas di Gresik, Jawa Timur. Tak lama setelah itu, kembali viral video berdurasi 54 detik yang memperlihatkan seorang pelajar memperlakukan gurunya dengan tidak hormat.

Kejadian berawal saat guru yang sedang mengajar menegur siswa tersebut karena merokok di kelas. Tak terima, siswa yang masih duduk di bangku SMP tersebut seolah-olah menantang gurunya berkelahi dan mencengkram kerah baju pria setengah baya tersebut. ■ **aan/sf**

Foto: Andri IHR

Anggota Komisi VII DPR RI Mahyudin menyoroti proses pengelolaan limbah cair berupa oli bekas menjadi salah satu bahan peledak (blasting) yang digunakan PT. Berau Coal Energy di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, untuk proses pembukaan lahan pertambangan baru yang dinilai masih sangat belum jelas dan perlu didalami lebih lanjut.

“Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan oli bekas menjadi salah satu bahan peledak (blasting) yang cukup tidak bisa dijelaskan dan harus didalami lebih lanjut dari temuan tersebut,” kata Mahyudin di sela-sela Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR dengan sejumlah mitra kerja dan Direktur PT. Berau Coal Energy di Berau, Kaltim, Rabu (06/2)

Legislator Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mempertanyakan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan alat peledak tersebut.

Komisi VII Soroti Proses Pembukaan Tambang Baru PT. Berau Coal Energy

Pasalnya, belum ada kepastian limbah cair berupa oli bekas itu yang termasuk dalam limbah kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau limbah yang berpotensi berbahaya itu sudah sepenuhnya dimusnahkan.

“Dari proses penanggungjawaban yang belum menerima izin, apakah

... belum ada kepastian limbah cair berupa oli bekas itu yang termasuk dalam limbah kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau limbah yang berpotensi berbahaya itu sudah sepenuhnya dimusnahkan.

bisa dipastikan limbah tersebut sudah dimusnahkan atau dijadikan objek bisnis. Nah itu yang perlu kita pastikan dari regulasi yang kita temukan,” tandas legislator Dapil Kalimantan Timur ini.

Ia berharap, perlu adanya kajian secara mendalam terhadap penggunaan limbah tersebut, sehingga dapat dipastikan penggunaan peledak tersebut tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. “Butuh kajian yang mendalam, jangan sampai penggunaan peledak tersebut dapat merugikan lingkungan,” tutup Mahyudin.

Sebelumnya Direktur Utama PT. Berau Coal Arief Wiedhartono menjelaskan bahwa pengolahan limbah cair berupa oli bekas dari aset atau kendaraan tambang digunakan menjadi bahan peledak (blasting). “Pengolahan limbah oli bekas digunakan menjadi salah satu bahan peledak (blasting),” kata Arief. ■ qq/sf



Anggota Komisi VII DPR RI Mahyudin tinjau PT. Berau Coal Energy di Kabupaten Berau.



Foto: Geratdi | Hr

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq.

Sungai Kemuning Perlu Diperluas

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq mengatakan, Sungai Kemuning di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur semakin dangkal dan perlu diperluas.

Akibat pendangkalan dan lebar sungai yang semakin menyempit, kerap terjadi banjir. Dengan upaya perluasan dan pendalam sungaian, yang selama ini ditengarai menjadi penyebab banjir, diharapkan dapat meminimalisir banjir.

“Pemerintah sudah melakukan program pengendalian banjir. Tinggal bagaimana mengakselerasi supaya proyek ini segera selesai, dan pengerukan perlu segera dilakukan,” kata Hamka saat

memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau proyek pengendalian banjir di Sungai Kemuning, Sampang, Jatim, Rabu (06/2).

Dari hasil peninjauan proyek pengendalian banjir itu, legislator PDI-Perjuangan itu menambahkan masih ada permasalahan pada pembebasan lahan milik masyarakat. Masyarakat Sampang belum merelakan lahannya, karena menganggap belum memperoleh ganti rugi, sehingga diperlukan intervensi dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya kira dengan selesainya banjir ini, masyarakat bisa beraktifitas kembali dan diharapkan proyek ini dapat menanggulangi dampak-dampak bencana alam, khususnya banjir ini agar Sampang bisa kembali normal. Ada keseriusan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi banjir,” jelas legislator dapil Jawa Timur II itu.

Sebelumnya Hamka menjelaskan, kunspek ini dalam rangka melihat perkembangan Sampang setelah terjadi banjir pada 16 Januari 2019 lalu, sekaligus melihat dan memantau perkembangan pembangunan proyek pengendalian banjir yang dilaksanakan PT. Adhi Karya, yang sudah berjalan 1 tahun dan sampai saat ini pekerjaannya sudah 50 persen. ■ **opi/sf**

“... dengan selesainya banjir ini, masyarakat bisa beraktifitas kembali dan diharapkan proyek ini dapat menanggulangi dampak-dampak bencana alam, khususnya banjir ini agar Sampang bisa kembali normal. Ada keseriusan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi banjir,

Investasi Bencana Akan Jadi Solusi Bagi Indonesia

Anggota Komisi IX Jalaludin Akbar menyebut bahwa investasi bencana akan menjadi solusi bagi penanganan bencana di Indonesia ke depannya.



Foto: Erlangga | HR

Anggota Komisi IX Jalaludin Akbar.

Menurutnya penanganan yang saat ini dilakukan oleh para petugas bencana sudah sangat baik, namun sangat penting apabila masyarakat Indonesia ke depan memahami maksud dari kebencanaan itu sendiri.

Investasi yang dimaksud adalah pendidikan sejak dini mengenai kebencanaan, bagaimana seseorang itu dapat memahami maksud dari bencana kemudian hingga bagaimana cara menghadapinya. Jalal, sapaan akrabnya bahkan mendorong agar pendidikan tanggap bencana dapat dijadikan salah satu mata pelajaran dalam kurikulum sekolah.

“Jadi kami mengimbau pemda dan pemerintah pusat untuk fokus kepada pendidikan dan pelatihan kepada semua masyarakat terutama kepada daerah yang memiliki potensi bencana yang tinggi baik itu banjir longsor dsb termasuk tsunami,”

“Memang diperlukan pendidikan yang sifatnya investasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya diperuntukkan kepada para petugas tanggap bencana, namun masyarakat pun juga harus dididik supaya mereka bisa memahami dan bisa memberikan pertolongan minimal kepada dirinya sendiri....”

ujar Jalal kepada **Parlementaria** di Provinsi Lampung, Rabu (08/2)

Jalal menambahkan masyarakat sudah seharusnya paham tentang kebencanaan, supaya mereka bisa minimal membantu dirinya sendiri ketika bencana datang melanda. Ia juga menyarankan agar pendidikan kebencanaan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah.

Jalal mengaku sangat bersimpati terhadap para korban di Kabupaten Lampung Selatan seraya berharap agar masyarakat di sana dapat lebih siap ke depannya ketika bencana melanda. Dengan adanya pendidikan kebencanaan, diyakini bisa meminimalkan potensi banyaknya korban jiwa. Ia menginginkan kerja sama yang baik dengan pemerintah untuk dapat memberi pencerahan kepada masyarakat terutama daerah rawan bencana.

“Memang diperlukan pendidikan yang sifatnya investasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya diperuntukkan kepada para petugas tanggap bencana, namun masyarakat pun juga harus dididik supaya mereka bisa memahami dan bisa memberikan pertolongan minimal kepada dirinya sendiri. Dan hal ini akan kami sampaikan kepada pemerintah,” imbuh Jalal.

Ketika ditanya masalah pendanaan, Jalal mengaku akan mencari solusi bersama dengan pemerintah agar program ini dapat tembus menjadi salah satu program pemerintah. Untuk itu ia berharap walaupun tersangkut masalah pendanaan, masyarakat harus membantu mendorong pemerintah karena hal ini penting dalam rangka menyadarkan masyarakat ketika menghadapi bencana. ■ **eps/es**

Revitalisasi PG Diharapkan Tingkatkan Produksi Gula

Anggota Komisi VI DPR RI Nashim Khan berharap program revitalisasi Pabrik Gula (PG) Asembagus dari 3000 Ton Cane per Day (TDC) menjadi 6000 TDC mampu meningkatkan produksi gula. Dengan hasil produksi gula yang lebih baik diharapkan juga mampu menekan impor gula, sehingga apa yang dicita-citakan Bangsa Indonesia untuk swasembada pangan, khususnya komoditas gula, bisa terealisasi.



Foto: Tiara | HR

Anggota Komisi VI DPR RI Nashim Khan.

Produsen Pangan Olahan dan Obat Tradisional Perlu Pembinaan

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menegaskan perlunya pembinaan bagi para produsen obat-obatan tradisional dan pangan olahan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal tersebut dikemukakan Imam saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan dalam rangka pengawasan label pangan olahan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di D.I Yogyakarta, Rabu (6/2).

Menurut Imam, para produsen pangan olahan dan obat-obatan tradisional adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan *home industry* memerlukan pembinaan dan pelatihan agar dalam pembuatan produknya tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya, pemanis buatan, pewarna dan sebagainya yang tidak sesuai aturan.

“Dari laporan BPOM DIY yang saya terima, masih banyak kasus-kasus pelanggaran terkait aturan label pangan



Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso.

olahan ini. Disini saya minta Kepala Dinas Kesehatan bekerja sama secara intensif dengan Kepala BPOM untuk melakukan pembinaan secara masif dan berkesinambungan,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.

Sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018, BPOM RI dan Kepolisian berhasil menemukan dan menyita berbagai macam produk makanan yang diganti label tanggal kadaluarsanya, dengan label baru. Kasus ini merupakan pelanggaran yang sering ditemukan BPOM RI di lapangan.

Itu yang kita harapkan,” harapnya.

Ke depan dirinya berharap, PG Asempagus nantinya bisa menjadi percontohan revitalisasi yang sukses. Dan pada akhirnya bisa melakukan pengembangan terhadap PG lainnya. Maka dari itu perlu adanya sinergi antara kemitraan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan daerah penghasil tebu, juga masyarakat, khususnya para petani tebu.

“Petani juga harus kita pikirkan bagaimana nantinya mereka punya semangat dalam menanam tebu dan menjadikan tebu sebagai sumber mata pencaharian mereka. Pabriknya bagus, masyarakat sejahtera, dan bangsa kita bisa berswasembada gula. Saya yakin kalau kita bersinergi bersama, kita pasti bisa,” tandas politisi dapil Jawa Timur III itu. (tra/■ tra/sf

Berdasarkan hasil pengawasan rutin BPOM terhadap label produk pangan yang beredar, pada tahun 2015 ditemukan 21,24 persen dari 8.082 label yang diawasi, tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tahun 2016, angka ini menurun menjadi 13,60 persen dari total 7.036 label yang diawasi. Kemudian pada tahun 2017, temuan kembali meningkat menjadi 13,68 persen dari 8.603 label yang diperiksa.

“Hasil pantauan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta di sejumlah pasar, mal, supermarket, serta, toko pada 3 Desember 2018 hingga 11 Januari 2019 menggunakan mobil laboratorium keliling, dengan total 78 sampel yang disampling, menunjukkan sebanyak 15 sampel atau 19 persen mengandung bahan berbahaya yaitu 10 sampel (12 persen) mengandung Rhodamin B dan lima sampel (6,4 persen) mengandung Boraks. Ini perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan agar kesadaran produsen membuat pangan olahan yang sehat terus meningkat,” tandas Imam.

Dirinya juga berpesan agar proses pengawasan pangan olahan dan obat-obatan tradisional tidak sampai membinasakan tapi lebih fokus bagaimana memberikan pembinaan. “Silahkan diawasi, diberi teguran tapi jangan sampai dibinasakan. Apalagi sekarang banyak obat herbal impor dari China dan negara lain beredar di apotik-apotik yang tak kalah berbahaya jika tidak diawasi secara ketat,” pungkas Politisi Dapil Jawa Tengah III ini.

Sementara itu, Direktur Registrasi Pangan Olahan Balai Besar POM DIY, Anisyah menjelaskan berdasarkan keterangan yang diperoleh, sebagian besar produk pangan olahan dan obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut berasal dari luar DIY (Magelang, Muntilan, Purworejo, Solo).

“Terhadap temuan tersebut, tindak lanjutnya adalah pernyataan dari pedagang untuk tidak menjual kembali produk mengandung bahan berbahaya,” tambahnya.

Ia menambahkan perlunya penambahan formasi SDM pembina, pengawas an penyuluh pangan dari Dinas Kesehatan DIY. Perlu regulasi untuk pemberian logo atau labelisasi pada sarana produksi makanan siap saji. Juga logo pada toko makanan oleh-oleh, agar dapat diketahui bahwa makanan yang dijual telah memenuhi ketentuan label pangan olahan,” tutupnya. ■ oji/es

“Dari hasil tinjauan, saya lihat tadi progres revitalisasi PG Asempagus sudah berjalan 90 persen dan hampir rampung. Semoga revitalisasi ini cepat selesai dalam bulan April, sehingga musim giling tahun ini bisa segera terealisasi dengan baik,” ungkap Nashim usai meninjau PG Asempagus bersama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, di Situbondo, Jawa Timur, Rabu (06/2).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, melalui revitalisasi PG nantinya diharapkan tebu yang diserap bukan hanya dari daerah sekitar Situbondo, melainkan juga dari daerah-daerah lainnya. “Diharapkan nantinya produksi gula kita bisa maksimal dan program pemerintah, yakni swasembada pangan itu bisa tercapai.



Foto: Erman | Hr

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea bersama dengan Bupati Pandeglang.

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menekankan agar pemerintah menambah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang.

Tidak hanya penambahan fasilitas sarana prasarana saja, tetapi juga termasuk sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga kesehatan.

“Kita tadi melihat kondisi Rumah Sakit Berkah yang mana ini adalah satu-satunya rumah sakit di Pandeglang. 172 tempat tidur harus menangani jumlah penduduknya 1,2 juta, kan itu rasio yang sangat tidak tidak sebanding,” terang Marinus Gea setelah pertemuan dengan

Pemerintah Harus Tambah Fasilitas di RSUD Berkah Pandeglang

Bupati Pandeglang beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pandeglang, Banten (06/2).

Pada saat mengunjungi RSUD Berkah, tim kunspek Komisi IX DPR RI melihat secara langsung masyarakat yang sedang mengantri. Antrian masyarakat tersebut sangat panjang, bahkan ada yang sudah menunggu selama dua jam. Baik itu yang sedang menunggu obat, maupun antri menunggu pelayanan. Marinus

menegaskan bahwasanya persoalan seperti ini harus segera ditangani dan tidak bisa dibiarkan.

“Ada beberapa rumah sakit yang harus segera ditindaklanjuti salah satunya Rumah Sakit Pratama Menes. Kemudian ada juga rumah sakit yang sudah selesai, dulu bermasalah, kemudian sekarang diserahkan ke pemerintah. Nanti kita minta disupport juga dengan peralatan-peralatan dan juga SDM nya, sehingga



Komisi XI Dorong Tingkatkan PNBP dari SDA

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendorong optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sektor komoditas atau sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu instrumen penerimaan negara selain pajak dan cukai.

Demikian disampaikan Heri Gunawan disela-sela Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel, di Palembang, baru-baru ini.

Heri menuturkan kenaikan harga komoditas alam, seperti sektor minerba dapat mendorong peningkatan realisasi PNBP. Mengingat, saat ini beberapa sektor seperti pertambangan mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami melihat di Sumsel ada 2 bagan yang relatif besar terutama pendapatan negara dari sisi sumber daya alamnya. Dengan terdongkraknya harga komoditas berarti daya beli pun akan bertambah sehingga kami berharap ada penambahan pendapatan negara,” papar politisi dapil Jawa Barat IV ini.

Ia menambahkan, dengan adanya UU Penerimaan Negara Bukan Pajak, potensi penerimaan negara dari PNBP akan semakin baik dan efisien. Apalagi dalam UU PNBP terdapat pengelompokan objek PNBP atau klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya.

Heri juga mendorong pemerintah dapat meningkatkan *tax ratio* untuk tahun 2019. *Tax ratio* merupakan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Migas dan Pertambangan Umum. Menurutnya, kebijakan perpajakan tahun 2019 diarahkan untuk



Foto: Anne | Hlr

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dengan didukung peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

“Dalam kaitan ini, banyak catatan yang seharusnya bisa lebih dikembangkan, termasuk pengembangan raihan pajak melalui penggunaan IT yang terintegrasi. Tata cara pencatatan di kantor pajak itu semestinya menggunakan IT terintegrasi antara pajak, bea cukai dan perbankan sehingga ngelink, namun sampai hari ini penggunaan IT itu belum kita lihat,” tandasnya.

■ ann/es

pelayanan yang dilakukan lebih maksimal,” tambah legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Disamping itu, ia mengapresiasi penanganan korban bencana tsunami yang dilakukan di RSUD Berkah. Dimana Penanganan korban termasuk juga identifikasi jenazah dilakukan dengan baik oleh pihak RSUD yang dibantu oleh relawan serta Tim Disaster Victim Investigation (DVI) Polda Banten.

“Ada lima jenazah yang tidak teridentifikasi. Hal tersebut dikarenakan jenazahnya sudah membusuk sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi. Kemudian kelima jenazah tersebut telah dimakamkan secara baik,” pungkas legislator dapil Banten III itu. ■ es

Pansus RUU Kewirausahaan Nasional Jaring Masukan Akademisi Sumsel

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional DPR RI menjaring masukan dari para pakar dan akademisi di Provinsi Sumatera Selatan, terkait RUU Kewirausahaan Nasional yang kini tengah dibahas di DPR RI.

Wakil Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional Wahyu Sanjaya mengatakan, masukan dari akademisi merupakan hal yang penting untuk segera merampungkan RUU Kewirausahaan Nasional.

“RUU ini dibentuk untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dari itu penting bagi kami menggali masukan masukan dari berbagai pihak, baik pakar hingga masyarakat,” ungkap Wahyu saat memberi sambutan dalam diskusi antara Pansus RUU Kewirausahaan Nasional dengan pakar dan akademisi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Sumsel, Selasa (12/2)

Dijelaskan Wahyu, kewirausahaan, khususnya di sektor usaha kecil dan koperasi merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat yang berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kewirausahaan nasional merupakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan warga Negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreatifitas dan inovasi,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa RUU Kewirausahaan Nasional ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan jumlah wirausaha pada skala usaha mikro ke skala usaha yang lebih besar, kedua, menumbuhkan wirausaha baru, dan ketiga, mendukung wirausaha sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof, Dr, H.M. Sirozi, MA, Ph.D menyampaikan harapannya agar RUU Kewirausahaan Nasional yang sedang dibahas di DPR RI mampu mengatur tata kewirausahaan di Indonesia dan mendorong tumbuhnya *entrepreneur* muda, guna meningkatkan perekonomian di negeri ini.



Wakil Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional Wahyu Sanjaya bertukar cenderamata dengan Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

“Semoga diskusi ini mampu memberikan kontribusi yang baik untuk DPR dalam menyelesaikan RUU Kewirausahaan Nasional dan nanti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di negeri ini,” jelasnya. Ia menilai, RUU ini penting untuk segera disahkan, terlebih konten terkait wirausaha sosial, selain menumbuhkan perekonomian dinilai mampu memberi bantuan sosial yang besar.

“Secara khusus terkait wirausaha sosial, kami melihat RUU ini mampu memberikan sentuhan sosial yang cukup besar. Di Indonesia dalam realitasnya sudah banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Ormas (Organisasi

Masyarakat), tapi belum tersentuh oleh kebijakan negara, sehingga berjalan apa adanya. Nah, dengan adanya RUU ini akan berkembang lebih pesat di Indonesia,” ungkapnya.

Diskusi ini turut dihadiri sejumlah Anggota Pansus RUU Kewirausahaan Nasional lainnya, diantaranya Martri Agoeng (F-PKS), Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan), Darmadi Duriyanto (F-PDI Perjuangan), Indah Kurnia (F-PDI Perjuangan), Melani Leimena Suharli (F-Demokrat), Ahmad Najib Qodratullah (F-PAN), Haerudin (F-PAN), Siti Mukaromah (F-PKB), Iskandar Dzulkarnain Syaichu (F-PPP) dan Nyat Kadir (F-NasDem).

■ rmm/sf

Masyarakat Maluku Harapkan RUU Daerah Kepulauan

Anggota Komisi XI DPR RI Edison Betaubun menilai RUU Daerah Kepulauan yang diketuainya sangat ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat daerah kepulauan termasuk masyarakat Provinsi Maluku.

Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Maluku, Ambon, Senin (04/2).

“RUU Daerah Kepulauan yang tengah dibahas oleh Pansus yang saya Ketuai sangat ditunggu oleh masyarakat di daerah kepulauan, salah satunya masyarakat Provinsi Maluku ini. Hal ini untuk lebih mengembangkan daerah kepulauan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagaimana yang tadi sempat disinggung oleh Kepala Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Maluku bahwa

Ketua BURT DPR Anthon Sihombing dalam sambutannya di RSUD Royal Prima, Medan, Jumat (8/2), mengatakan, kunjungan ini sekaligus juga ingin mengetahui sejauh mana kesiapan rumah sakit provider dalam memberikan layanan terbaik bagi anggota dewan sebagai pejabat negara. “Kami ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya,” ucapnya.

BURT DPR Tinjau RSUD Royal Prima Medan

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau RSUD Royal Prima di Medan, Sumatera Utara. Tinjauan ini merupakan bagian dari pengawasan DPR untuk melihat dari dekat rumah sakit provider yang menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk para Anggota DPR RI dan keluarganya.



Foto: Jaka | H&R

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau RSUD Royal Prima di Medan, Sumatera Utara.

Direktur Utama RSUD Royal Prima Suhartinah Darmadi menjelaskan, RSUD yang dipimpinnya ini bertipe B dengan 600 lebih tempat tidur. Untuk layanan ICU saja tersedia 150 tempat tidur. Bagi para anggota dewan dan keluarganya tersedia VIP super. “Kami pasti akan menempatkan

di kamar yang paling bagus,” katanya.

Suhartinah melanjutkan, RSUD ini sudah berdiri sejak 2015. Untuk rumah sakit swasta, Royal Prima termasuk yang terbesar di ASEAN. Ia juga berharap, kerja sama dengan PT. Jasindo sebagai penyedia Jamkestama bisa berkelanjutan. Di pulau

Sumatera, rumah sakit ini juga diklaim yang terbaik dan lengkap. Dari segi layanan, RSUD ini tak bertanya uang DP atau dari mana pun ketika pasien datang berkunjung. Royal Prima berkomitmen memberi layanan yang terbaik bagi pasien. ■ mh/es



Anggota Komisi XI DPR RI Edison Betaubun.

Foto: Ayu | H&R

ada beberapa tantangan yang harus dialami Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan dalam meningkatkan penerimaan Negara,” ujar Edison.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan bahwa dengan adanya RUU Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahasnya bersama anggota Panitia Khusus (Pansus) lainnya itu menjadi salah satu solusi untuk bisa mengembangkan atau lebih membangun daerah kepulauan menjadi lebih baik lagi, dan tidak tertinggal dengan Negara lainnya.

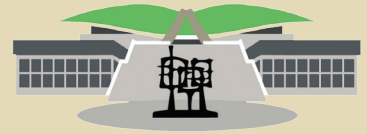
Ia meyakini sebelum Masa Bakti DPR RI Periode 2014 – 2019 berakhir, pihaknya mampu merampungkan RUU tersebut, sebagai salah satu “hadiah” bagi masyarakat Kepulauan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Bea dan

Cukai Provinsi Maluku Finari menjelaskan tantangan yang menggambarkan kondisi Provinsi sebagai sebuah daerah kepulauan itu secara tidak langsung menjadi sebuah hambatan bagi daerah ini untuk bisa mencapai target maksimal.

Tantangan tersebut diantaranya adalah dengan luas wilayah 11 Kabupaten/ Kota yang ada dan terdiri dari berbagai pulau, sarana transportasi yang ada masih sangat terbatas. Bahkan beberapa kantor cabang bea cukai dan pajak berada di wilayah terpencil, dipelosok Maluku seperti di Namlea dan Dobo.

“Tidak hanya sarana transportasi, masalah jaringan internet dan intranet yang masih sangat terbatas juga menjadi sebuah tantangan yang harus dialami oleh Bea dan Cukai Provinsi Maluku,” pungkas Finari. ■ ayu/es



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima siswa dan siswi SMA Negeri 1 Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2019). Foto: Geraldi | Hr



Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019). Foto: Arief | Hari



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat memimpin Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019). Foto: Azka | Hr

